

ANALOGI “AKAR DAN BATANG POHON”: PARTISIPASI POLITIK TUANKU TAREKAT SYATHARIYAH DALAM PARTAI POLITIK PADA ERA REFORMASI DI PADANG PARIAMAN¹

Sadri Chaniago

Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas,
Kampus Unand Limau Manis Padang
sadrichaniago@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang partisipasi politik tuanku Tarekat Syathariyah dalam partai politik pada era reformasi Padang Pariaman, Sumatera Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang menunjukkan partisipasi politik tuanku tarekat Syathariyah dalam partai politik di Padang Pariaman. Penelitian ini mengidentifikasi bentuk dan faktor pendorong partisipasi politik secara langsung dan secara tidak langsung tuanku tarekat Syathariyah dalam partai politik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan bentuk penelitian lapangan (*field research*). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan pengamatan (*observation*). Analisis menggunakan konsep partisipasi politik, dan relasi tarekat dengan politik. Informan penelitian adalah *tuanku* tarekat Syathariyah yang menjadi pengurus partai politik di tingkat daerah, yang ditriangulasikan dengan informan lainnya. Informan dipilih melalui *purposive sampling*. Data sekunder diperoleh melalui kajian perpustakaan (*library research*). Temuan penelitian menunjukkan dua bentuk partisipasi politik tuanku tarekat Syathariyah dalam partai politik di tingkat lokal Padang Pariaman, yaitu: partisipasi politik secara langsung, dan partisipasi politik secara tidak langsung. Faktor pendorong partisipasi politik tuanku tarekat Syathariyah secara langsung adalah: memperjuangkan agama Islam, memperbaiki penyimpangan dalam politik praktis, memperjuangkan aspirasi tarekat Syathariyah, menambah wawasan dalam bidang politik dan pemerintahan, dan pembuktian sosial, serta pragmatis dan oportunistis dalam berpolitik. Faktor pendorong tuanku tarekat Syathariyah memilih bentuk partisipasi politik secara tidak langsung adalah karena penolakan sebagian masyarakat apabila tuanku melakukan partisipasi politik secara langsung dalam partai politik. Partisipasi politik tuanku tarekat Syathariyah dalam partai politik memiliki empat fungsi: mengejar kebutuhan ekonomi, memuaskan penyesuaian sosial, mengejar nilai-nilai khusus, memenuhi keperluan bawah sadar dan psikologis tertentu. Partisipasi politik tuanku tarekat Syathariyah dalam partai politik merupakan *anti tesis* dari pendapat yang mengatakan bahwa kaum tarekat cenderung untuk menjauhkan diri dari kehidupan dunia dan urusan politik.

Kata Kunci : partisipasi politik, tuanku tarekat Syathariyah, partai politik.

PENDAHULUAN

Kabupaten Padang Pariaman merupakan kawasan yang banyak terdapat penganut Tarekat Syathariyah. Diperkirakan jumlah penganut tarekat Syathariyah di kawasan ini “melebihi 100,000 orang” (*Tempo*, 19 Januari 1980). Ditinjau dari jumlah komposisi penduduk, menurut Samad (Makmur, 2005) penganut tarekat Syathariyah (sebagai

¹ Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yang didanai oleh Hibah Skim Penelitian Dosen Muda, Dana BOPTN Universitas Andalas APBNP Tahun Anggaran 2012.

tradisionalis Islam²) di Padang Pariaman diperkirakan dalam jumlah 50% dari keseluruhan penduduk kawasan ini. Sedangkan 30% lagi merupakan golongan Islam tradisional moderat, serta 20% sisanya dari golongan modernis Islam.

Sampai sekarang pun, keberadaan pengikut tarekat Syathariyah masih dapat disaksikan dalam berbagai aspek kehidupan di Padang Pariaman. Dalam amalan keagamaan misalnya, mereka masih melaksanakan tradisi penetapan masuknya bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri melalui metode “*maniliak bulan*”³ (*rukayah*) (Malalak, 2009), tradisi menggunakan bahasa Arab dan memakai sorban serta tongkat dalam khutbah hari raya maupun khutbah Jumat (*Antara Sumbar*, 21 September 2009). Mereka juga masih mengamalkan tradisi *basapa* (bersyafar)⁴ ke makam Syekh Burhanuddin di Ulakan (*Harian Singgalang*, 08 Februari 2009).

Semua aktifitas ibadah jemaah tarekat Syathariyah ini dipimpin oleh tuanku⁵, yaitu ulama tradisional tarekat Syathariyah dalam konteks lokal Padang Pariaman. Sebagaimana lazimnya tradisi dalam tarekat, tuanku merupakan tokoh yang memiliki “kedudukan yang penting” sebagai pemimpin kerohanian dalam tarekat Syathariyah (Atjeh, 1980:62). Mereka juga memainkan peranan penting dalam komunitas tarekat Syathariyah, sebagai tokoh yang dimuliakan dan menjadi panutan karena merupakan “pemimpin, sekaligus guru” (Dobbin, 1974:326). Mereka sangat dihormati, petuahnya didengar, tingkah lakunya diikuti, berfungsi sebagai penerang di dunia dan akhirat, dan selalu dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan (Pramono dan Bahren, 2009:105).

² Tradisionalis Islam dipahami sebagai kelompok yang biasanya mengaku sebagai pengikut salah satu mazhab dalam Islam yang sering menghubungkan amalan keislamannya dengan Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas, dan Abu Hanifah. Selain dari itu, mereka merujuk *al-Qur'an*, *al-Hadits*, *Ijma'*, *Qiyas*, sebagai sumber dalam mengamalkan Islam. Tradisi kelompok tradisionalis Islam yang mengikuti salah satu mazhab dalam Islam juga menggunakan *ijma'* ulama sebagai salah satu dari sumber hukum membuat mereka secara terus menerus merujuk kepada karya-karya ulama *salaf* dalam mengambil keputusan hukum (*istinbat*) (Turmudi, 2004: 275-276).

³ Melihat *hilal* sebagai tanda masuknya bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri dengan mata telanjang, tanpa menggunakan alat bantu seperti teropong yang moderen.

⁴ Tradisi menziarahi makam Syekh Burhanuddin setiap bulan *Syafar*. Selain untuk beribadah, *basapa* juga merupakan ajang berkumpulnya anggota tarekat Syathariyah dari seluruh Sumatera Barat dan wilayah lainnya di Indonesia untuk membicarakan segala sesuatu tentang tarekat Syathariyah.


⁵ *Tuanku* ialah ulama tradisional di Padang Pariaman Sumatera Barat, yang menamatkan pengajiannya di pondok pesantren tradisional/surau (*Salafiyah*). Ia merupakan pemimpin dan guru dalam tarekat Syathariyah.

Walaupun berbagai kalangan beranggapan bahwa kaum tarekat.⁶ merupakan kelompok yang *zuhud* dan cenderung menjauhi kehidupan dunia, namun di Padang Pariaman tuanku tarekat Syathariyah cenderung menafikan anggapan di atas. Mereka terlihat selalu bersentuhan dengan penguasa dan pelaku dunia politik praktis. Dalam aktifitas kehidupan sehari-hari sering terlihat para menteri, panglima TNI, Tokoh politik, pemimpin partai, datang mengunjungi para tuanku di surau atau pondok pesantrennya.




Di antara fakta mengenai hal di atas misalnya dapat dilihat pada kasus Buya Zubir Tuanku Kuniang. Ia merupakan seorang ulama *senior* tarekat Syathariyah di Padang Pariaman, yang terkenal memiliki banyak pengikut dan cukup berpengaruh dalam konteks politik lokal. Ia sering menerima kunjungan pejabat pemerintahan dan pimpinan militer seperti: Kepala Staf Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia (KASAD TNI), Kepala Pusat Kebijakan Militer Tentara Nasional Indonesia (KAPUSPOM TNI), Ketua umum partai, Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Bupati Padang Pariaman, dan sebagainya (Armaidi Tanjung, 2007:49).

Secara lebih khusus, tuanku tarekat Syathariyah juga terlihat terlibat secara aktif dalam kancah politik praktis lokal dengan menjadi pengurus partai politik. Hal ini dapat terlihat dari fenomena beberapa orang tuanku tarekat Syathariyah yang menjadi pengurus partai politik pada tingkat daerah Kabupaten Padang Pariaman. Mereka terlihat menjadi pengurus pada partai politik seperti: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Hal ini terlihat sebagaimana dinyatakan dalam tabel di bawah ini:

Tabel : Tuanku Tarekat Syathariyah Yang Menjadi Pengurus Partai Politik Di Padang Pariaman

	LAMBANG PARTAI	PARTAI	NAMA TUANKU
1.		PKB	1. Ali Basyar Tuanku Sutan Sinaro 2. Zulhelmi Tuanku Sidi

⁶ Tarekat dalam Islam cenderung dimaknai sebagai cara hidup atau jalan mistik-walaupun bagaimanapun bentuk dan ajaran yang mendasarinya- menitik-beratkan kepada upaya setiap diri manusia untuk mengembangkan potensinya sehingga mencapai tahap kesempurnaan (*insan kamil*), dan cenderung mengabaikan dunia (Thohir & Riyadi, 2002:13).

3.		GOLKAR	1. Rahmat Tuanku Sulaiman 2. Saamar Tuanku Sidi
4.		HANURA	1. Suhaili Tuanku Mudo
5.		PKPB	1. Darwinis Tuanku Sutan
JUMLAH		6 Orang	

Sumber: Identifikasi awal Penulis

Fenomena penting yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: adanya indikasi yang menunjukkan partisipasi politik tuanku tarekat Syathariyah dalam partai politik, yang terlihat memiliki kecenderungan terbagi kepada dua bentuk, yaitu partisipasi politik secara langsung (dengan menjadi pengurus pada partai politik), dan partisipasi politik secara tidak langsung (dengan tidak menjadi pengurus dalam partai politik). Indikasi partisipasi politik partisipasi politik secara langsung terlihat dilakukan oleh beberapa orang tuanku tarekat Syathariyah yang menjadi pengurus partai politik di Padang Pariaman. Sedangkan partisipasi politik secara tidak langsung terlihat diantaranya dari partisipasi politik yang dilakukan oleh Buya H. Zubir Tuanku Kuniang.

Fenomena ini sepertinya bertentangan dengan anggapan beberapa kalangan selama ini yang menyatakan bahwa bahwa kaum tarekat merupakan kelompok yang *zuhud* dan cenderung menjauhi kehidupan dunia. Tarekat dalam Islam cenderung dimaknai sebagai cara hidup atau jalan mistik-walau bagaimanapun bentuk dan ajaran yang mendasarinya- menitik-beratkan kepada upaya setiap diri manusia untuk mengembangkan potensinya sehingga mencapai tahap kesempurnaan (*insan kamil*), dan cenderung mengabaikan dunia (Thohir & Riyadi, 2002:13). Namun di Padang Pariaman, tuanku tarekat Syathariyah terlihat cenderung menafikan anggapan di atas. Mereka terlihat selalu bersentuhan dengan penguasa dan pelaku dunia politik praktis. Oleh karena itu artikel ini bertujuan : *pertama*, mengidentifikasi bentuk partisipasi politik secara langsung dan secara tidak langsung tuanku tarekat Syathariyah dalam partai politik di era reformasi. *Kedua*, mengidentifikasi atau melacak faktor

pendorong tuanku tarekat Syathariyah memilih bentuk partisipasi politik secara langsung dan tidak langsung dalam partai politik.

METODE PENELITIAN

Artikel ini dihasilkan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan paradigma dan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan proses untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, dengan berdasarkan kepada penciptaan gambaran yang bersifat saling berkaitan antara satu sama lain, sebagai suatu sistem terpadu yang menyeluruh (*holistic*), dan dibentuk dengan kata-kata dalam sebuah latar alami (Creswell, 2003:1).⁷ Pendekatan ini dianggap mampu untuk meneliti faktor-faktor yang tidak terlihat (*intangible*) seperti norma sosial, status sosial ekonomi, peranan gender, etnis, dan agama, yang berperan dalam isu penelitian yang mungkin tidak dapat dibaca dengan nyata (Mack *et.al*, 2005:1).

Data penelitian dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan, wawancara mendalam (*indepth interview*), dan observasi. Informan utama penelitian ini adalah tuanku tarekat Syathariyah yang menjadi pengurus partai politik di Padang Pariaman. Selain mereka, juga diwawancara informan triangulasi (*cross check*), yang terdiri individu tuanku dan bukan tuanku, di mana mereka diyakini memahami dan memiliki informasi yang diperlukan mengenai fokus penelitian ini. Informasi dari mereka dijadikan sebagai *cross check (triangulation)* informasi yang diperoleh dari informan utama (Kanto, 2003:59).

Para informan tersebut terpilih melalui teknik penarikan sampel *Purposive Sampling* (Chua Yan Piaw, 2006:202). Persyaratan yang digunakan dalam memilih informan merujuk kepada Spradley (Kanto, 2003:54), yaitu: (a). telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktifitas yang

⁷ Metode kualitatif bersifat penafsiran yang wajar terhadap setiap permasalahannya, dan bekerja dalam *setting* alami, yang berusaha untuk memahami dan memberikan penafsiran terhadap fenomena yang dilihat dari arti yang diberikan oleh orang-orang kepadanya (Salim, 2001:5). Penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau membuat generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan ia hanya lebih difokuskan kepada representasi terhadap fenomena sosial (Kanto dalam Bungin, 2003:53).

berhubungan dengan objek penelitian, dan menghayati secara bersungguh-sungguh lingkungan atau objek yang hendak diteliti. (b). masih terlibat secara penuh dalam permasalahan yang diteliti. (c). memiliki waktu yang cukup atau kesempatan untuk diwawancarai. (d). bersifat jujur dan apa adanya dalam memberikan informasi. (e). tergolong “masih asing” dengan penelitian.

Data penelitian dianalisis menggunakan model strategi analisis deskriptif kualitatif (Bungin, 2003:83), yang dilakukan secara serentak dengan proses pengumpulan data. Data yang diperoleh direduksikan (*data reduction*) melalui proses merangkum hasil pengumpulan data selengkap mungkin, memilih data ke dalam satuan konsep, kategori, dan tema tertentu (Faisal 2003:70). Dalam penerapan model strategi analisis deskriptif kualitatif tersebut di atas, secara lebih spesifik peneliti menggunakan metode analisis komponensial (*componential analysis*), yang dilakukan ketika seluruh kegiatan wawancara telah memperoleh hasil yang maksimum (Bungin, 2003:95-96).

Keabsahan data hasil penelitian diukur dari tingkat “keterpercayaan” (*trustworthiness*), dan “keaslian” (*authenticity*) (Salim, 2001:78), di mana keduanya akan diukur dari standar kepercayaan (*credibility*) (Kanto, 2003:59). Dalam praktek standar kredibilitas ini, selain berusaha untuk memperpanjang proses pengumpulan data, juga dilakukan triangulasi data (*data triangulation*). (Creswell, 2002:7).

Triangulasi bertujuan untuk melakukan klarifikasi terhadap sejumlah bahan, data dan informasi yang dikumpulkan, serta memverifikasi hasil observasi atau interpretasi yang dibuat oleh peneliti (Salim, 2001:99). Selain itu, penggunaan triangulasi dalam kualitatif bertujuan untuk meningkatkan kesahan (*validity*) dan kebolehpercayaan (*reliability*) hasil penelitian kualitatif (Chua Yan Piaw, 2006: 10, 218; Creswell, 2002: 161-162; Aziz S.R dalam Bungin, 2003:59-60).

PENELUSURAN KONSEP

Huntington dan Nelson, menyatakan partisipasi politik sebagai aktifitas warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi perumusan kebijakan oleh pemerintah (Budiardjo, 1981:2) Sedangkan Herbert McClosky, mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktifitas sukarela dari warga masyarakat, di mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung mengambil peranan dalam proses pembentukan kebijakan umum (Budiardjo, 1981:1).

Secara umum, partisipasi politik dari segi bentuknya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu partisipasi politik aktif dan partisipasi politik pasif. Partisipasi politik aktif dapat berupa: mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan kebijakan umum alternatif yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi politik pasif berupa kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah (Surbakti, 1992:142).

Di samping partisipasi politik aktif dan pasif di atas, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun partisipasi pasif, yaitu kategori apatis. Kelompok apatis ini ada karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Menurut Jalbi (Ruslan 2000:105), kelompok apatis ini terbagi kepada dua kelompok, yaitu : Kelompok *pertama*, yaitu orang-orang yang memang tidak berusaha untuk berpartisipasi, seperti orang-orang yang sudah terbiasa tidak menggunakan hak suara mereka. Sebagai contoh: apatis sebagian tokoh agama yang memiliki pemahaman sempit akan agamanya, yang beranggapan bahwa apatis politik merupakan suatu nilai.

Kelompok kedua, yaitu orang-orang yang meremehkan urusan politik. Bentuk konkret sikap ini dapat di lihat dari tiga fenomena yaitu: (a). *Apatis* politik, tidak memberikan perhatian terhadap apa yang terjadi di dalam masyarakat dan bersikap patuh kepada segala kebijakan penguasa. *Apatis* Ini muncul akibat ketidakmampuan individu untuk memikul tanggung jawab, atau akibat rasa takut dan tidak aman. (b). Keraguan politik, yaitu ketidakpercayaan seseorang terhadap sikap dan perkataan para politisi, serta perasaan bahwa aktivitas politik adalah pekerjaan buruk (c). Keterasingan politik, yaitu perasaan asing yang dirasakan oleh individu terhadap pemerintah dan sistem politik masyarakatnya, dan keyakinan bahwa pemerintah dikendalikan oleh orang-orang yang mementingkan kepentingannya sendiri melalui cara-cara yang tidak adil, serta munculnya perasaan bahwa kekuasaan bukanlah urusannya. Oleh karena itu, telah menghilangkan semangat dan motivasinya untuk berpartisipasi.

Milbrath dan Goel (dalam Surbakti, 1992:143) dari perspektif aktor yang melakukan partisipasi politik juga telah membedakan partisipasi menjadi beberapa bentuk. *Pertama, apatis*, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua, spektator*, artinya orang yang setidaknya-tidaknyapun pernah ikut memberikan suara pada pemilu *Ketiga, gladiator*, artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator, mengadakan hubungan langsung, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. *Keempat*, pengkritik yakni dalam bentuk partisipasi non konvensional.

Roth dan Wilson (dalam Budiardjo, 1981:6), telah menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan tingkat intensitas partisipasi politik yang dilakukan oleh aktornya, yaitu: Intensitas terendah sebagai pengamat, intensitas menengah sebagai partisipan, dan intensitas tertinggi sebagai aktivis. Intensitas terendah sebagai pengamat biasanya melakukan aktifitas politik seperti: menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai politik/kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media, dan memberikan suara dalam pemilu. Pada intensitas menengah sebagai partisipan, aktifitas partisipasi politik yang sering dilakukan adalah menjadi anggota tim kampanye, menjadi anggota aktif dari partai politik/kelompok

kepentingan, dan aktif dalam proyek proyek-proyek sosial. Intensitas tertinggi sebagai aktivis biasanya memiliki jumlah yang sedikit. Aktifitas politik pada jenjang aktivis ini adalah: menjadi pengurus partai sepenuh waktu, pemimpin partai politik/kelompok kepentingan. Di samping ketiga kategori di atas itu, ada juga warga negara yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik. Mereka ini oleh Roth dan Wilson disebut sebagai orang yang apolitis.

Olsen (dalam Surbakti, 1992:143) berdasarkan struktur aktor yang melakukan partisipasi politik, juga telah membagi partisipasi politik menjadi enam lapisan, yaitu : pemimpin politik, aktivis politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap, dan informasi politik lainnya kepada orang lain), warga negara, marginal, (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik), dan orang yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik).

Adapun fungsi dari pada partisipasi politik menurut Lane (Rush dan Althoff, 2000:181) adalah sarana untuk: mengejar keperluan ekonomi, memuaskan keperluan penyesuaian sosial, mengejar nilai-nilai khusus, dan memenuhi keperluan bawah Sadar dan psikologis tertentu. Mengenai faktor pendorong partisipasi politik, Huntington dan Nelson (1994:22) menyatakan bahwa salah satu pendorong partisipasi politik adalah karena motivasi yang ada pada seseorang atau kelompok untuk pencapaian tujuan-tujuan melalui saluran saluran politik yang ada.

Sementara itu partisipasi politik juga diyakini didorong oleh faktor kesadaran politik, dan kepercayaan terhadap pemerintah (sistem politik) (Surbakti, 1992:144).⁸ Sedangkan Jalbi (dalam Ruslan, 2000: 101-102) menyatakan bahwa partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

⁸ Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah : apakah pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.

- a. Keyakinan agama yang diimani oleh individu.
- b. Faktor jenis kelamin individu : lelaki atau wanita.
- c. Tingkat pendidikan.
- d. Jenis Budaya politik, atau bentuk nilai dan keyakinan tentang kegiatan politik yang mempengaruhinya.
- e. Karakter lingkungan politik.

Weber (Rush dan Althoff, 2000:181) juga telah mengemukakan bahwa partisipasi politik dapat dilakukan karena dorongan-dorongan yang ada pada diri seseorang yang didasari oleh motif-motif sebagai berikut:

- Rasional bernilai, yaitu didasarkan pada penerimaan secara rasional terhadap nilai-nilai suatu kelompok,
- Efektual dan emosional, didasarkan kepada kebencian atau *enthusiasme* terhadap suatu ide, organisasi, atau individu.
- Tradisional, didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu dari suatu kelompok sosial.
- Rasional bertujuan, didasarkan atas keuntungan pribadi.

Dari pendapat para sarjana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendorong partisipasi politik adalah :

- Motivasi untuk pencapaian tujuan-tujuan saluran-saluran politik yang ada.
- Kesadaran politik.
- Kepercayaan terhadap pemerintah (sistem politik).
- Keyakinan agama yang diimani oleh individu.
- Jenis budaya politik.
- Karakter lingkungan politik.

- Rasional bernilai, yaitu penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok.
- Efektual dan emosional, yaitu kebencian atau entusiasme terhadap suatu ide, organisasi, atau individu.
- Tradisional, yaitu penerimaan norma tingkah laku individu dari suatu kelompok sosial.

Huntington dan Nelsen (Kamarudin, 2003:95) melihat basis partisipasi politik dapat bersifat individual atau kelompok. Basis kolektif terbagi atas lima bagian, yaitu :

- Kelas, yaitu pengelompokan individu atas status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang sama.
- Kelompok komunal, yaitu pengelompokan individual karena persamaan ras, agama, bahasa, dan etnis.
- Lingkungan, yaitu individu-individu yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.
- Partai politik, yaitu individu individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol terhadap eksekutif dan legislatif.
- Golongan. Adapun golongan diartikan sebagai individu individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus-menerus dan intens satu sama lain, salah satu manifestasinya berupa pengelompokan patron klien. Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik ini dapat terwujud dengan berbagai bentuk, namun hal yang harus menjadi pertimbangan utama adalah efektifitas dan efisiensi cara dan alternatif dari bentuk partisipasi politik yang dipilih.

Tarekat dan tasawuf pada umumnya dimaknai sebagai aktivitas kehidupan *zuhud*, rela hidup prihatin, melakukan berbagai jenis ibadah, melaparkan diri, mengerjakan shalat malam, dan melantunkan berbagai jenis wirid sampai fisik

menjadi lemah. Sedangkan dimensi ruhani (jiwa) menjadi kuat (Thohir & Riyadi, 2002: 14). Tarekat juga dipahami “suatu sistem atau petunjuk dalam melakukan ibadah untuk memperoleh ridha Allah, dibimbing oleh seorang guru/*murshid*” (Atjeh, 1985:67), lebih mengutamakan aspek batiniah dari pada aspek lahiriah melalui memperbanyak zikir kepada Allah (LIMTI, 1989:59), bertujuan untuk mensucikan batin (Mircea Eliade, seperti dikutip Mulyati. *et.al*, 2004:153).

Berdasarkan definisi tarekat di atas, tidak mengherankan apabila ada perspektif yang mengatakan bahwa tarekat merupakan suatu gejala depolitisasi, sangat menghindari sikap politik, dan merupakan bentuk pelarian tanggungjawab sosial dan politik (Bruinessen, 1992:3-14). Namun demikian, anggapan ini sepertinya dinafikan oleh fakta dalam sejarah peradaban Islam di berbagai belahan dunia yang menunjukkan; sepanjang abad ke 19 dan awal abad ke 20 M ulama tarekat telah berhasil muncul sebagai pemimpin gerakan *protest* yang menantang dominasi kekuasaan kolonialisme yang *otoritarian*. Kelompok tarekat tidak hanya menjadi sarana untuk mencapai tahap kesempurnaan spiritual, akan tetapi juga berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun dan menyalurkan aspirasi sosial politik (Thohir dan Riyadi, 2002:17-18).

Hal di atas pada hakikatnya merupakan anti tesis terhadap perspektif yang mengatakan bahwa tarekat merupakan gejala depolitisasi. Dengan demikian, ulama tarekat dianggap lebih memfokuskan diri menekuni dunia spiritual dan kurang/tidak bersentuhan dengan dunia politik yang dianggap “kotor” tampaknya kurang bisa diterima. Sejak dahulu, kelompok tarekat di berbagai pelosok dunia sudah bersentuhan dengan politik dan kekuasaan (Soprianti 2009). Hal ini juga diperkuat oleh Gibb dan Bowen, yang juga menafikan ulama tarekat tidak memiliki *interest* terhadap politik (Azra, 1999:170).

Dengan demikian, walaupun tarekat merupakan aktifitas pembersihan diri dan lebih mementingkan akhirat dibandingkan dunia, akan tetapi ulama tarekat masih peduli dengan isu-isu politik (Sujuthi, 2001). Mereka tidak hanya memainkan peranan dalam kehidupan agama saja, akan tetapi juga berkecimpung dalam aktifitas sosial dan politik, sehingga kemudiannya muncul sebagai pemimpin sosial dan politik (Horikoshi, 1987:1).

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

Analogi “Batang Pohon”:Partisipasi Politik Secara Langsung Dalam Partai Politik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik tuanku tarekat Syathariyah dalam partai politik di tingkat lokal Padang Pariaman, Sumatera Barat, dapat diidentifikasi kepada dua bentuk, yaitu: partisipasi politik secara langsung (yang mereka istilahkan sebagai bentuk batang pohon), dan partisipasi politik secara tidak langsung, yang disebut juga sebagai bentuk akar pohon.

Bentuk partisipasi politik secara langsung tuanku tarekat Syathariyah dalam partai politik adalah: keikutsertaan atau keterlibatan tuanku tarekat Syathariyah secara resmi, atau langsung terjun dalam kehidupan politik praktis dengan menjadi bagian dalam struktur kepengurusan partai politik (pengurus partai politik). Adapun faktor yang menjadi pendorong sehingga ada sebagian tuanku tarekat Syathariyah yang memilih bentuk partisipasi politik secara langsung dalam partai politik ini adalah: *Pertama*, untuk memperjuangkan dan meningkatkan agama Islam ke arah yang lebih baik, dengan memperjuangkan berbagai program yang berkaitan dengan umat Islam, seperti: bantuan keuangan untuk mesjid dan mushalla dalam anggaran keuangan daerah Padang Pariaman.

Kedua, untuk memperbaiki segala bentuk penyimpangan dalam politik praktis, serta meluruskan paradigma terhadap dunia politik praktis yang selama ini dianggap kotor dan kejam. Walaupun harapan ini nampaknya terkesan *utopia* karena tidak mungkin beberapa orang tuanku akan mampu mencegah politisi lain untuk melakukan berbagai penyimpangan, namun paling tidak dengan adanya tuanku tarekat Syathariyah yang berpartisipasi dalam partai politik dan menjadi anggota DPRD, akan mampu memperlambat atau mengurangi kecenderungan penyimpangan dan penyelewengan di dalam politik praktis. Walaupun para tuanku tarekat Syathariyah tidak dapat berbuat banyak dalam politik, paling tidak mereka mampu mewarnai dunia politik tersebut.

Ketiga, untuk memperjuangkan aspirasi dan memajukan *'aqidah* kaum tarekat Syathariyah, agar tidak tertinggal dalam kehidupan dunia kini. Partisipasi politik yang dilakukan tuanku tarekat Syathariyah berfungsi sebagai “penyambung lidah” dalam memperjuangkan berbagai program yang memberikan perhatian kepada permasalahan tuanku dan “*orang surau*” sebagai kaum tradisionalis Islam yang selama ini cenderung “agak diabaikan” dalam kebijakan pemerintah, terutama mengenai program-program dan anggaran keuangan bagi pondok pesantren *salafiyah*. Aktifitas tuanku sebagai anggota pengurus partai politik juga akan memudahkan tuanku dan jamaah tarekat Syathariyah untuk berurusan dengan kekuasaan pada tingkat daerah Padang Pariaman. Melalui kedekatan tuanku tarekat Syathariyah dengan penguasa di daerah (seperti bupati), maka usaha-usaha untuk mendapatkan bantuan dan anggaran keuangan bagi pondok pesantren *Salafiyah* diyakini akan dipermudah. Tidak lupa, melalui partisipasi politik secara langsung, tuanku tarekat Syathariyah hendak meluruskan pemahaman orang banyak yang “keliru” terhadap tarekat Syathariyah selama ini.

Keempat, untuk menambah wawasan dalam bidang politik dan pemerintahan, serta untuk menambah pergaulan duniawi, karena selama ini cenderung bergaul dengan kalangan pondok pesantren *Salafiyah* saja.

Kelima, untuk pembuktian secara sosial kepada orang banyak (masyarakat) bahwa tuanku tarekat Syathariyah tidak hanya pandai berdakwah melulu (membaca doa, berceramah), akan tetapi juga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi di dalam politik praktis. Dengan adanya tuanku yang berpolitik melalui sarana partai politik dan menjadi anggota DPRD, secara sosial merupakan suatu kebanggaan (*prestige*) bagi tuanku dan jamaah tarekat Syathariyah. Ini akan menunjukkan bahwa tuanku dan jamaah tarekat Syathariyah telah mampu “*tegak sama tinggi, duduk sama rendah*” dan memiliki derajat yang sama dengan kalangan lain di Padang Pariaman. Sehingga dengan demikian tuanku dan jamaah Syathariyah tidak lagi “tertinggal” dalam putaran kehidupan ini.

Keenam, tidak dapat dinafikan, terdapat sebagian kecil tuanku tarekat Syathariyah yang melakukan partisipasi politik untuk tujuan pragmatis dan oportunistis dalam berpolitik, bukan untuk kepentingan agama Islam dan tarekat

Syathariyah. Hal ini dapat dipahami karena para tuanku tarekat Syathariyah tidak pernah dibantu dan diberikan gaji oleh pihak manapun, sehingga tidak memiliki sumber penghasilan ekonomi yang jelas.

Analogi “Akar Pohon”: Bentuk Partisipasi Politik Secara Tidak Langsung Dalam Partai Politik.

Partisipasi politik secara tidak langsung tuanku tarekat Syathariyah dalam partai politik (akar pohon) adalah: keterlibatan tuanku tarekat Syathariyah dalam politik dengan tidak bergabung ke dalam partai politik secara resmi, tidak memegang jabatan dalam partai, atau sama sekali tidak berafiliasi dengan partai apapun. Dengan kata lain, mereka hanya menjadi pendukung partai politik dari luar struktur partai. Pada bentuk partisipasi politik jenis ini, walaupun tuanku tarekat Syathariyah tidak berada dalam struktur kepengurusan partai politik, namun mereka berperan serta dalam berbagai agenda politik di tingkat lokal seperti pada pemilihan umum (pemilu), dan sebagainya. Keberadaan mereka dapat dinyatakan melalui ungkapan “tidak ke mana-mana akan tetapi berada di mana-mana.”

Adapun faktor pendorong sebagian tuanku tarekat Syathariyah (terutama tuanku senior) lebih memilih bentuk partisipasi politik secara langsung adalah karena adanya kerisauan dan penolakan sebagian dari masyarakat apabila tuanku melakukan partisipasi politik secara langsung dalam partai politik, karena masih dipandang asing dan tabu. Masyarakat masih belum dapat menerima dan tidak menginginkan tuanku tarekat Syathariyah yang dianggap sebagai institusi yang masih sangat suci/sakral⁹ melakukan partisipasi politik secara langsung dalam partai politik. Sebagai cerminan dari penolakan dan kerisauan mereka tersebut dinyatakan melalui ungkapan: “apabila tuanku berpolitik, maka akan kacaulah dunia.”

Penolakan terhadap partisipasi politik secara langsung tuanku tarekat Syathariyah dalam partai politik pada dasarnya disebabkan oleh “*bias*” dan kelirunya pemahaman masyarakat terhadap “politik”. Mereka telah terlanjur

⁹ Pengertian sakral di sini bukan dalam makna *magic*, akan tetapi memiliki posisi dan kedudukan di atas rata-rata dalam pemahamannya mengenai Islam, dibandingkan muslim awam.

memaknai politik sebagai sesuatu yang penuh tipu daya (*fudaah*), identik dengan kecurangan dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, seseorang yang secara langsung berpartisipasi dalam politik praktis diyakini bersifat “*kalau tidak runcing, pasti tajam.*” Sebagai akibat kelirunya masyarakat dalam memahami makna politik telah menimbulkan dampak bagi pemahaman mereka terhadap tuanku yang melakukan partisipasi politik secara langsung di dalam partai politik. Muncul anggapan yang kurang baik dari masyarakat terhadap tuanku yang memasuki partai politik, yaitu sudah tidak bersih lagi dan telah tercemar.

Pada hakikatnya penolakan masyarakat terhadap partisipasi politik secara langsung tuanku tarekat Syathariyah dalam partai politik adalah untuk menjaga *muruh* tuanku. Apabila tuanku berpolitik maka diyakini akan hilanglah *muruh* atau wibawanya. Masyarakat masih menginginkan agar tuanku tetap pada fungsinya yang ada, yaitu: mengurus agama Islam, dan memenuhi berbagai keperluan keagamaan masyarakat (mengajarkan al-Qur’an, memberikan *tausiah*, mendoakan orang meninggal, dan sebagainya), tidak perlu mencampuri urusan politik dan pemerintahan.

Khususnya dalam kalangan tarekat Syathariyah sendiri, apabila seseorang tuanku terlalu menonjolkan diri dan melakukan partisipasi politik secara langsung dalam partai politik, maka biasanya akan berimpak kepada berkurangnya wibawa dan jamaah tuanku tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena dalam pandangan jamaah tarekat, bidang tuanku adalah keilmuan Islam/ilmu *ukhrawi*, bukan bidang politik.

Tuanku tarekat Syathariyah yang memilih partisipasi politik bentuk akar pohon biasanya juga akan memainkan peran penting sebagai “aktor di balik layar” (*the man behind the gun*) yang sangat menentukan dalam proses dan percaturan politik lokal. Mereka ini lazimnya adalah para tuanku *senior*, yang memiliki pengaruh kuat dalam kalangan tarekat Syathariyah sendiri maupun di kalangan luar tarekat. Kadang kadang, sebagai ganti diri, mereka memasukan (meletakkan) anak mereka ke dalam jabatan yang ada dalam partai, kemudian mendukungnya dari luar partai politik.

Fakta partisipasi tuanku tarekat Syathariyah dalam politik kepartaian dengan menjadi pengurus dalam partai politik, bahkan menjadi anggota DPRD di Padang Pariaman, terlihat sesuai dengan pendapat Horikoshi (1987:1), yang menyatakan bahwa ulama tradisional terlihat “tidak hanya memainkan peranan dalam kehidupan agama saja, akan tetapi juga turut serta berkiprah dalam berbagai aktifitas sosial dan politik, sehingga kemudian muncul sebagai pemimpin sosial dan politik.”

Secara lebih khusus, tuanku tarekat Syathariyah telah melakukan partisipasi politik secara langsung dalam partai politik dengan menjadi pengurus partai politik. Mereka terlihat menjadi pengurus pada partai politik seperti: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Partisipasi tuanku tarekat Syathariyah dalam partai politik di Padang Pariaman ini, dalam ranah perspektif ilmu politik dikenal sebagai partisipasi politik.

Dalam melakukan partisipasi politik (*citizen participation*) tuanku tarekat Syathariyah melakukan aktifitas sukarela, di mana terlihat mereka turut serta dalam proses pemilihan pemimpin politik dan turut serta - secara langsung maupun tidak langsung dengan menjadi anggota partai politik, dan menjadi anggota lembaga politik seperti DPRD Kabupaten Padang Pariaman (Budiardjo, 2000:161).

Partisipasi politik yang dilakukan tuanku tarekat Syathariyah ini melibatkan persoalan hak, peluang, dan ruang bagi penglibatan tuanku dan jemaah tarekat Syathariyah sebagai golongan minoritas masyarakat dalam proses politik lokal di Padang Pariaman. Dengan kata lain, partisipasi tuanku tarekat Syathariyah dalam partai politik wajar disebut sebagai partisipasi politik, karena melibatkan persoalan perilaku politik golongan tuanku sebagai elit tarekat Syathariyah, yang ingin memperoleh kekuasaan atau ingin mempengaruhi kuasa politik lokal di Padang Pariaman (Hussein, 1994:223).

Berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh tuanku tarekat Syathariyah sebagai faktor pendorong dalam melakukan partisipasi dalam partai politik, maka dapat dijelaskan bahwa partisipasi politik yang dilakukan oleh tuanku tarekat

Syathariyah dalam politik kepartaian di Padang Pariaman, memiliki tiga fungsi utama yaitu: mengejar kebutuhan ekonomi, memuaskan penyesuaian sosial, mengejar nilai-nilai khusus, memenuhi keperluan bawah sadar dan psikologis tertentu (Lane seperti dikutip Rush dan Althoff, 2000:181).

Pertama, mengejar kebutuhan ekonomi. Dalam bahasa lain, ini disebut sebagai motivasi untuk kedudukan dan kepentingan ekonomi (Hussein, 1994:227). Sedangkan Weber (seperti dirujuk Rush dan Althoff, 2000:181) menyebutnya sebagai kepentingan ekonomi (sebagai salah satu motif dalam melakukan partisipasi politik, yaitu rasional bertujuan, didasarkan untuk keuntungan pribadi). Pada konteks ini, partisipasi politik yang dilakukan oleh tuanku tarekat Syathariyah yang memilih bentuk partisipasi politik secara langsung dalam partai politik (*structural*) bertujuan untuk mendapatkan kepentingan ekonomi. Hal ini terlihat dari adanya segelintir tuanku tarekat Syathariyah yang menjadikan partisipasi politiknya dalam politik kepartaian untuk kepentingan pribadi dan oportunistik dalam berpolitik. Walaupun tidak banyak tuanku tarekat Syathariyah yang menekankan kepada fungsi ini, namun keberadaannya tidak dapat dinafikan begitu saja.

Sedangkan bagi tuanku tarekat Syathariyah yang melakukan partisipasi politik dengan bentuk secara tidak langsung, fungsi mengejar keperluan ekonomi ini bertujuan untuk memperoleh bantuan materi untuk tuanku tarekat Syathariyah itu sendiri maupun untuk pembangunan surau-surau dan pondok pesantren tarekat Syathariyah. Hal ini dapat dipahami karena para tuanku tarekat Syathariyah tidak pernah dibantu dan diberikan gaji oleh pihak manapun, dan mereka tidak memiliki sumber penghasilan ekonomi yang jelas. Oleh karena itu bantuan materi untuk tuanku itu sendiri maupun untuk pembangunan surau surau dan pondok pesantren tarekat Syathariyah merupakan sesuatu yang sangat diharapkan.¹⁰

¹⁰ Dengan demikian, tidak mengherankan apabila pada musim pemilu, tuanku tarekat Syathariyah terlihat banyak memainkan peranan dengan memanfaatkan situasi ini. Pola yang biasanya mereka gunakan adalah: dengan mengumpulkan jemaah tarekat Syathariyah dalam satu forum tertentu, kemudian diundang calon yang ikut serta berkompetisi pada pemilu (presiden, legislatif, bupati dan gubernor) atas nama forum "silaturahmi". Kemudian ketika kegiatan tersebut berakhir, maka calon tersebut kemudian menyumbangkan sejumlah uang dan lain-lain untuk pesantren tuanku tersebut.

Kedua, memuaskan penyesuaian sosial. Fungsi memuaskan penyesuaian sosial ini tercermin dari alasan yang dikemukakan dalam partisipasi politik secara langsung, yaitu: untuk menambah wawasan dalam bidang politik dan pemerintahan, serta untuk menambah pergaulan, karena selama ini cenderung bergaul dengan kalangan dalam pondok pesantren Salafiyah.

Ketiga, mengejar nilai-nilai khusus. Partisipasi politik tuanku tarekat Syathariyah dalam partai di Padang Pariaman terlihat memiliki fungsi untuk mengejar nilai-nilai khusus tertentu, yaitu: nilai-nilai agama Islam, menjadi penjaga moral dalam praktek politik praktis, serta untuk memperjuangkan kaum tarekat Syathariyah. Dengan kata lain, mereka ingin menjadikan nilai-nilai agama Islam sebagai suatu keyakinan agama, sebagai panduan dalam berpolitik. Dalam istilah Jalbi (seperti dikutip Ruslan, 2000:101-102), faktor keyakinan agama ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik individu.

Keempat, memenuhi keperluan bawah sadar dan psikologis tertentu. Tidak dapat dinafikan, partisipasi politik tuanku tarekat Syathariyah dalam politik kepartaian di Padang Pariaman salah satunya bertujuan sebagai pembuktian secara sosial kepada masyarakat umum bahwa tuanku tarekat Syathariyah tidak hanya pandai berdakwah saja (mendoa, berceramah), akan tetapi juga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik praktis.

Apabila ditinjau dari aspek pelaku yang melakukan partisipasi politik (Milbrath dan Goel seperti dirujuk Surbakti, 1992:143), maka partisipasi politik yang dilakukan oleh tuanku tarekat Syathariyah termasuk ke dalam tipe *gladiator*. Dalam hal ini tuanku tarekat Syathariyah melakukan partisipasi dalam partai politik sebagai individu yang secara aktif terlibat dalam proses politik dengan menjadi pengurus / aktivis partai (dan juga merangkap sebagai pekerja kampanye ketika pemilu).

Sedangkan dari penggolongan (tipologi) partisipasi politik yang disebut oleh Dahl sebagai “hierarki partisipasi politik” (seperti dirujuk Hussein, 1994:225), maka tuanku tarekat Syathariyah yang melakukan partisipasi politik dalam politik kepartaian di Padang Pariaman termasuk ke dalam kategori kedua, yaitu golongan politik pencari kekuasaan, yaitu mereka yang berminat untuk

mendapatkan kekuasaan politik untuk membuat atau mempengaruhi kebijakan. Sedangkan bagi tuanku tarekat Syathariyah yang berhasil menjadi anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman (dalam konteks ini Zulhelmi tuanku Sidi), dapat digolongkan sebagai golongan pemimpin politik, yaitu golongan yang mempunyai kekuasaan formal dan berupaya menentukan serta mempengaruhi kebijakan pemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman.

Ditinjau dari aspek bentuk-bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan tingkat intensitas partisipasi politik yang dilakukan oleh pelakunya (Roth dan Wilson, seperti dikutip Budiardjo, 1981:6), maka tuanku tarekat Syathariyah yang melakukan partisipasi dalam politik kepartaian berada pada intensitas tertinggi sebagai aktifis, yaitu dengan menjadi pengurus partai sepenuh waktu, dan menjadi pemimpin partai politik, walaupun hanya pada kepemimpinan partai tingkat daerah di Padang Pariaman.

Berdasarkan struktur aktor yang melakukan partisipasi politik menurut Olsen (seperti dikutip Surbakti, 1992:143), maka tuanku tarekat Syathariyah berada pada tingkat tertinggi sebagai pemimpin politik. Sedangkan berdasarkan hirarki menurut Michael Rush dan Philip Althoff (Hussein, 1994:225-226), maka mereka termasuk ke dalam golongan pertama dan kedua. Bagi tuanku tarekat Syathariyah yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, maka ia berada pada golongan pertama, yaitu golongan yang memegang jabatan politik dan administrasi negara. Sedangkan tuanku tarekat Syathariyah yang menjadi pengurus dan pimpinan partai politik berada pada golongan kedua, yaitu golongan yang berusaha untuk mendapatkan jabatan politik atau administrasi negara.

Walau bagaimanapun, partisipasi politik yang dilakukan oleh tuanku tarekat Syathariyah dalam politik kepartaian di Padang Pariaman tidak dapat dipisahkan dari basis yang menjadi pijakannya. Sesuai dengan pandangan Huntington dan Nelson (Kamarudin, 2003:95), maka basis partisipasi politik tuanku tarekat Syathariyah adalah partai politik. Dalam konteks ini, partai dapat didefinisikan secara lebih "*comprehensive*" sebagai: satu kelompok anggota warga negara yang sedikit banyaknya terorganisasikan secara rapi serta stabil dalam suatu organisasi resmi, di mana mereka bertindak sebagai suatu kesatuan

politik yang dipersatukan dan dimotivasi oleh ideologi (orientasi, nilai nilai dan cita cita) tertentu, memiliki tujuan utama sama ada untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, melalui cara konstitusional pada pemilu.

Dengan kekuasaan yang diperoleh, mereka dapat melaksanakan alternatif kebijakan yang mereka susun, sehingga memberikan manfaat secara ideologi dan materi kepada anggota partainya. Dengan demikian adalah menjadi jelas, bahwa aktifitas tuanku tarekat Syathariyah sebagai warga negara dalam partai politik (seperti Golkar, PKB, PKPB) merupakan salah satu bentuk nyata dari partisipasi politik (Budiardjo, 2000:161).

Partai politik telah dijadikan oleh tuanku tarekat Syathariyah sebagai sarana dalam melakukan partisipasi politik, untuk melaksanakan haknya sebagai individu warga negara biasa dalam rangka mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, serta turut serta dalam menentukan pemimpin pemerintahan di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Partai politik telah memberikan peluang, mendorong, dan mengajak tuanku tarekat Syathariyah sebagai warga negara untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan untuk mempengaruhi proses politik lokal di Kabupaten Padang Pariaman (Surbakti, 1992:118). Partai politik juga telah dijadikan sebagai sarana oleh tuanku tarekat Syathariyah untuk turut serta dalam rekrutmen politik, yaitu seleksi dan pemilihan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya (Surbakti, 1992:118).

KESIMPULAN

Fakta mengenai partisipasi politik tuanku tarekat Syathariyah dalam partai politik kepartian di Padang Pariaman ini terlihat merupakan merupakan *anti tesis* dari pendapat yang mengatakan bahwa kaum tarekat cenderung untuk menjauhkan diri dari urusan politik. Hal ini sepertinya juga tidak mendukung anggapan bahwa tarekat lebih berorientasi kepada urusan *ukhrawi* dari pada urusan dunia, yang menekankan aspek asketis (*zuhud*) dan orientasi *ukhrawi* dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga tarekat kononnya menjauhkan diri dari

masyarakat (*khalwah, uzlah*), sebagaimana definisi yang diberikan terhadap kelompok tarekat selama ini.

Dengan demikian, perkembangan tarekat dianggap sebagai suatu gejala depolitisasi, sebagai pelarian dari tanggungjawab sosial dan politik, dan sangat menghindar daripada sikap politik (Bruinessen, 1992:3-14), agaknya kurang sesuai dengan kenyataan empirik yang terjadi. Merujuk kepada pendapat Sunyoto (Sujuthi, 2001), partisipasi tuanku tarekat Syathariyah dalam partai politik menunjukkan bahwa; meskipun tarekat merupakan aktifitas pembersihan diri dan lebih mementingkan akhirat dibandingkan kehidupan dunia, namun terlihat ulama tarekat masih peduli dengan berbagai aktifitas politik.

Mengikuti pendapat Mulyati (2004), anggapan selama ini terhadap ulama dan kelompok tarekat; yang sering diasosiasikan sebagai kelompok yang lebih memfokuskan diri untuk menekuni dunia spiritual dan tidak bersinggungan dengan dunia politik yang dianggap identik dengan “kotor” adalah kurang bisa diterima. Sejak dahulu, kelompok tarekat di Indonesia dan di berbagai pelosok dunia sudah bersinggungan dengan politik dan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armaidid Tanjung, Bagindo. 2007. *Tuanku menggugat*. Padang: Pustaka Artaz.
- Antara Sumbar. 2009. Imam jamaah Syattariyyah berkhotbah sambil pegang tongkat. 21 September. <http://www.antara-sumbar.com/id/?sumbar=berita&d=2&id=47841> (15 Mei 2010).
- Atjeh, Aboebakar. 1980. *Pengantar ilmu tarekat dan tasauf (huraian tentang mistik)*. Ipoh Perak: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Konteks berteologi di Indonesia, pengalaman Islam*. Jakarta: Penerbit Paramadina. Cet.1
- Budiardjo, Miriam. 1981. *Partisipasi dan partai politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2003. Teknik teknik analisis kualitatif dalam penelitian sosial. Dlm. Bungin, Burhan (pnyt). *Analisis data penelitian kualitatif, pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*, hlm. 83-105. Jakarta: PT. RajaGrafindo.ed.1.cet.1.
- Bruinessen, Martin Van. 1992. *Tarekat dan politik: amalan untuk dunia atau akherat ? Majalah Pesantren Vol. IX No.1 (3-14)*.
- Chua, Yan Piaw. 2006. *Kaedah penyelidikan*. Buku 1. Malaysia: Mcgraw-Hill Sdn.Bhd.

- Creswell, John.W. 2003. *Desain penelitian, pendekatan kualitatif & kuantitatif*. Terj. Jakarta: KIK Press.
- Darlington, Yvonne,. Scott, Dorothy. 2002. *Qualitative research in practice stories from the field*. Singapore: South Wind Productions.
- Dobbin, Christian. 1974. *Islamic revivalism in Minangkabau at the turn of the nineteenth century*. Modern Asian Studies, Vol.8. No.3. hal. 326. <http://www.jstor.org.stable/311737>.
- Faisal, Sanapiah. 2003. Pengumpulan dan analisis dalam penelitian kualitatif. Dlm. Bungin, Burhan (pnyt). *Analisis data penelitian kualitatif, pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*, hlm. 64-79. Jakarta: PT. RajaGrafindo.ed.1.cet.1
- Fathurrahman, Oman. 2003. Tarekat *Syattariyyah* di Dunia Melayu: kajian atas dinamika dan perkembangannya melalui naskah naskah di Sumatera Barat. Disertasi doktor ilmu pengetahuan budaya pada Program Studi Ilmu Susastra. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
-2004. Tarekat *Syattariyyah* memperkuat ajaran neosufisme. Dlm. Mulyati, Sri (pnyt), *Mengenal & memahami tarekat tarekat muktabarah di Indonesia*, hlm. 152-179. Jakarta: Kencana, ed.1, cet.1.
- Harian Singgalang. 2009. Ulakan akan dibanjiri umat *basyafa*, berzikir, muliakan guru. 08 Februari.
- Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kyai dan perubahan sosial*. Terj. Umar Basalim & Andi Muarly Sunrawa. Perhimpunan Pembangunan Pesantren (P3M): Jakarta. cet.1.
- Hussein, Syed Ahmad. 1994. *Pengantar Sains Politik*. Pulau Pinang : Penerbitan bersama Dewan Bahasa dan Pustaka dengan Pusat Pengajian Luar Kampus Universiti Sains Malaysia.
- Istadiyantha, 2006. Fungsi tarekat *Syattariyyah*: suatu telaah filologis, Makalah Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia dalam Perspektif Pergaulan Internasional (PIBSI) XXVIII, diselenggarakan IKIP PGRI Semarang, Semarang, 2 –4 Juli 2006.
- Jamil, M. Muhsin. 2008. *Tarekat dan dinamika sosial politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kahin, Audrey. 2005. *Dari pemberontakan ke integrasi, Sumatera Barat dan politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kamarudin. 2003. *Partai politik Islam di pentas reformasi; refleksi pemilu 1999 untuk pemilu 2004*. Jakarta: Visi Publishing.
- Kanto, Sanggar. 2003. Sampling, validitas dan reabilitas dalam penelitian kualitatif, Dlm. Bungin, Burhan (pnyt). *Analisis data penelitian kualitatif, pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*, hlm. 51-63. Jakarta: PT. RajaGrafindo.ed.1.cet.1
- Lembaga Ilmiah Metafisika dan Tasawuf Islam (LIMTI), 1985. *Mutiara Al-Qur'an dalam: capita selecta tentang agama, metafisika, ilmu eksakta*. Jilid III. Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi.

- Lubis, Ardiansyah. 2010. Ulama dukung Irwan-MK. Pemilukada Padang Pariaman 2 putaran. *Padang Ekspres*, 14 Mei. Tulisan ini Juga dimuat di halaman web resmi tim kampanye Irwan Paryitno dan Muslim Kasim: <http://irwanprayitno.info/berita/aktual/1273833919-alim-ulama-dukung-irwan-mk.htm>
- Makmur, Hendra. 2005. Pilkada Kabupaten Padang Pariaman antara lapau surau dan laga-laga. *Media Indonesia*. 08 April.
- Mack. Natasha., Woodsong, Cynthia., Macqueen, Kathleen M., Guest, Greg & Namey, Emily. 2005. *Qualitative research methods: a data collector's field guide*. North Carolina: Family Health International.
- Malalak, Yurisman. 2009. Syattariyyah: lebaran, Senin atau Selasa. *Padang Ekspres*, 15 September.
- Mulyati, Sri (pnyt). 2004. *Mengenal & memahami tarekat tarekat muktabarah di Indonesia*, hlm. 152-179. Jakarta: Kencana, ed.1, cet.1.
- Pababbari, Musafir. 2010. Patronase Agama dalam kehidupan politik lokal (melemahnya nilai-nilai tradisional agama masyarakat). Makalah, *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke – 10*. Hal. 583 - 600, Diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Banjarmasin, 1-4 Nopember.
- Pramono & Bahren, 2009. *Kepemimpinan Islam di kalangan kaum tua dalam naskah-naskah tarekat Syattariyyah di Minangkabau*. Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 7. No. 1 (91–108).
- Ruslan, Ustman Abdul Muiz. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia.
- Rush, Michael dan Althoff, Philip. 2000. *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim, Agus (Penyt). 2001. *Teori Dan paradigma penelitian sosial (dari Denzin Guba dan penerapannya)*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Samad, Duski. 2003. Tradisionalisme Islam di tengah modernisme. Disertasi doktor pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Seidman. Irving. 2006. *Interviewing as qualitative research: a guide for researchers in education and the social sciences. Third edition*. New York and London: Teachers College Press.
- Sujuthi, Mahmud. 2001. *Politik tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah Jombang, hubungan agama, negara dan masyarakat*. Yogyakarta: Galang Press.
- Soparianti, Pera. 2009. *Benarkah ahli tariqot berpolitik ?* <http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/artikel/540-benarkah-ahli-tariqot-berpolitik.html> (Kamis, 23 April 2009).
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tempo. 1980. Tarekat bukan Islam jama'ah. 19 Januari. Edisi 47/IX.
- Thohir, Ajid & Riyadi. Dedi Ahimsa. 2002. *Gerakan politik kaum tarekat, telaah historis gerakan politik antikolonialisme tarekat Qadiriyyah-Naqsabandiyah di pulau Jawa*. Bandung: Pustaka Hidayah.

- Tohri, Ahmad. 2006. *Pandangan dan sikap politik Tuan Guru tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah dan implikasinya bagi partisipasi politik komunitas tarekat di Lombok*, Tesis master (S2) Program Studi Magister Sosiologi. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Turmudi, Endang. 2003. *Perselingkuhan kiai dan kekuasaan*. Yogyakarta: LKis.
- Yatim, Syafriadi S. *et al* (ed). 2010. *Pemilu 2009 dalam angka, satu suara untuk masa depan*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia.

Wawancara

- Ahmad Zein *Tuanku* Sutan, wawancara pada hari Selasa, 4 Desember 2012 di Dusun Kampung Baru, Desa Koto Marapak, Kec. Pariaman Timur, Kota Pariaman.
- Amiruddin *Tuanku* Majo Lelo, wawancara pada hari Kamis, 6 Desember 2012 di Perumnas Kelurahan Kampung Baru, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman.
- Ali Basar *Tuanku* Sutan Sinaro, wawancara pada hari Kamis, 6 Desember 2012 di Dusun Tarok, Desa Cubadak Mentawai, Kec. Pariaman Timur, Kota Pariaman.
- Azwar *Tuanku* Sidi, wawancara pada hari Sabtu / 1 Desember 2012 di Pondok Pesantren Jamiatul Mukminin, Nagari Sintuk, Kec. Sintuk Toboh Gadang (SINTOGA) Kabupaten Padang Pariaman.
- Bagindo Armaidid Tanjung, wawancara pada hari Sabtu, 8 Desember 2012 di Sekretariat Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pariaman, di Desa Manggung, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman.
- Rahmat *Tuanku* Sulaiman, wawancara pada hari Minggu, 2 Desember 2012 di SD & SMP Model Internasional, Limpato, Kec. VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman.
- Saamar *Tuanku* Sidi, wawancara pada hari Kamis, 29 Nopember 2012 di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Padang Pariaman.
- Suhaili *Tuanku* Mudo, wawancara pada hari Sabtu, 1 Desember 2012 di Pondok Pesantren Darul Ikhlas Batang Kapecong, Sarang Gagak Pakandangan, Kabupaten Padang Pariaman.
- Syofyan Marzuki *Tuanku* Bandaro, wawancara pada hari Minggu, 9 Desember 2012 di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Pulau Air, Nagari Tandikat, Kec. Patamuhan, Kabupaten Padang Pariaman.
- Zulhelmi *Tuanku* Sidi, wawancara pada hari Kamis, 29 Nopember 2012 di Pondok Pesantren Darul Ikhlas Batang Kapecong, Pakandangan, Kabupaten Padang Pariaman.